

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki tantangan dan hambatan dalam pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi di negara berkembang terutama negara Indonesia pada umumnya memiliki permasalahan seperti kemiskinan, kesenjangan ekonomi, tingginya pertumbuhan penduduk hingga pada tingkat pengangguran yang masih tinggi. Untuk mencapai pembangunan ekonomi di Indonesia, pemerintah telah berusaha meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia, dengan menerapkan kebijakan moneter, kebijakan fiskal dan lain sebagainya (Prayitno & Kusumawardani, 2022). Adapun salah satu permasalahan yang masih sering muncul di Indonesia adalah tingkat pengangguran yang tinggi, dimana pertumbuhan angkatan kerja meningkat tidak sejalan dengan ketersediaan lapangan kerja yang ada. Adanya lapangan kerja dalam jumlah yang besar tidak menjadi masalah jika daya dukung dalam negeri mendukung terpenuhinya lapangan kerja.

Pembangunan ekonomi yang pesat di suatu daerah, akan menjadi daya tarik bagi tenaga kerja. Di sisi lain, keterlambatan pembangunan ekonomi di suatu daerah tertentu dapat menjadi pendorong tenaga kerja untuk meninggalkan daerah tersebut misalnya seperti Banten. Sebelum menjadi provinsi, Banten merupakan bagian dari Provinsi Jawa Barat. Terpisahnya Banten dari Provinsi Jawa Barat dikarenakan permasalahan pada pembangunan ekonomi. Salah satu cara untuk mendorong pembangunan ekonomi daerah adalah melalui pemekaran wilayah. Setelah terpisah dari Jawa Barat kini tingkat pengangguran di provinsi Banten mengalami fluktuatif setiap tahunnya dan termasuk kedalam provinsi dengan tingkat pengangguran tertinggi di Indonesia. Hal ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah provinsi Banten karena salah satu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi adalah berkurangnya

pengangguran (Suripto & Subayil, 2020). Ketika tingkat penganggurannya rendah, maka dapat dikatakan pembangunan ekonominya berhasil. Begitu pula sebaliknya ketika tingkat pengangguran tinggi, maka pembangunan ekonominya dapat dikatakan belum berhasil.

Menurut Sukirno (2002) Pengangguran merupakan suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. Pengangguran merupakan suatu permasalahan penting yang sering terjadi oleh setiap negara, khususnya pada negara berkembang seperti Indonesia (Priastiwati & Handayani, 2019). Menurut Mankiw (2007) tingkat pengangguran dapat dihitung dengan cara membandingkan jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja yang dinyatakan dalam persen. Lebih lanjut Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan pengangguran terbuka (open unemployment) adalah seluruh angkatan kerja yang mencari pekerjaan, baik yang mencari pekerjaan pertama kali maupun yang pernah bekerja sebelumnya (Mustakim et al., 2022). Untuk mendapatkan gambaran mengenai tingkat keparahan masalah pengangguran, maka tingkat pengangguran terbuka (TPT) digunakan sebagai parameter. Daerah dengan tingkat TPT yang lebih tinggi memiliki tingkat pengangguran yang lebih tinggi. Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 1. 1 Tingkat Pengangguran Terbuka di Pulau Jawa  
Tahun 2013-2022 (Dalam Persen)**

Provinsi	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Dki Jakarta	8.63	8.47	7.23	6.12	7.14	6.65	6.54	10.95	8.50	7.18
Jawa Barat	9.16	8.45	8.72	8.89	8.22	8.23	8.04	10.46	9.82	8.31
Jawa Tengah	6.01	5.68	4.99	4.63	4.57	4.47	4.44	6.48	5.95	5.57
DI Yogyakarta	3.24	3.33	4.07	2.72	3.02	3.37	3.18	4.57	4.56	4.06
Jawa Timur	4.30	4.19	4.47	4.21	4	3.91	3.82	5.84	5.74	5.49
Banten	9.54	9.07	9.55	8.92	9.28	8.47	8.11	10.64	8.98	8.09

Sumber: (Badan Pusat Statistik, 2023)

Dalam penulisan penelitian ini peneliti memilih pulau Jawa khususnya

Provinsi Banten sebagai objek penelitian disebabkan karena pulau Jawa merupakan pulau terpadat di Indonesia. Berdasarkan data BPS pada Tabel 1.1, dapat dilihat bahwa persentase pengangguran di enam provinsi dengan tingkat pengangguran tertinggi di pulau Jawa tahun 2013-2022 mengalami fluktuasi. Provinsi Banten hampir selalu menjadi provinsi dengan tingkat pengangguran tertinggi setiap tahunnya, lalu diikuti oleh provinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta. Pada tahun 2013-2019 tingkat pengangguran di Provinsi Banten tertinggi se-Pulau Jawa. Pada tahun 2013 TPT di Banten sebesar 9,54%. Kemudian pada tahun 2014 mengalami penurunan menjadi 9,54% hingga 9,07%, lalu pada tahun 2015 meningkat kembali menjadi 9,55%. Sejak tahun 2016 hingga tahun 2022 tingkat pengangguran di Provinsi Banten hanya mengalami peningkatan pada tahun 2017 dan 2020.

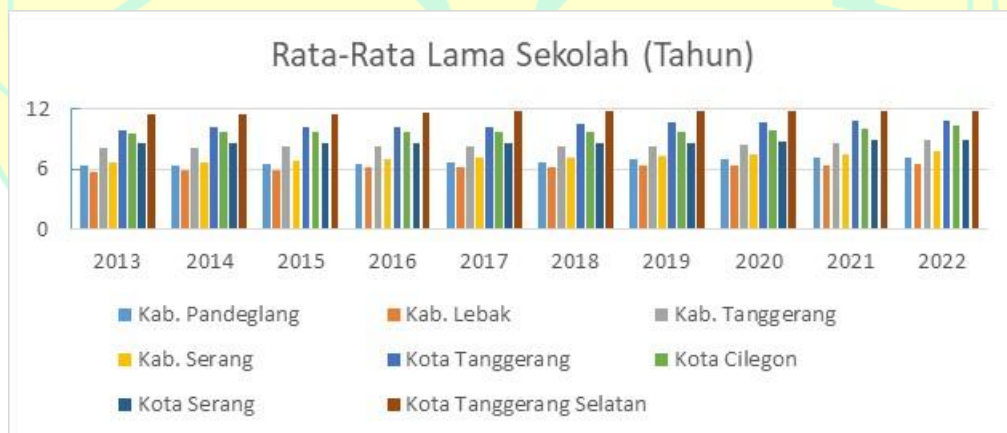
Berdasarkan data BPS tahun 2013-2022 TPT di Kab/Kota di Provinsi Banten cenderung fluktuatif. Kab/Kota yang memiliki tingkat pengangguran tertinggi di Banten yaitu pada Kab. Serang dengan rata-rata keseluruhan dari tahun 2013-2022 sebesar 12,91%. Sedangkan Kab/Kota mempunyai TPT terendah adalah Kota Tangerang Selatan dengan rata-rata keseluruhan dari tahun 2013-2022 sebesar 6,55%. Secara lebih rinci dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



**Gambar 1. 1 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kab/Kota di Provinsi Banten Tahun 2013-2022 (Dalam Persen)**

Sumber: Badan Pusat Statistik Banten (2023)

Berdasarkan Gambar 1.1 terdapat perbedaan TPT di 8 kab/kota di Provinsi Banten, faktor penyebab perbedaan tersebut seperti peningkatan penduduk yang tidak merata, keadaan geografis, sumber daya alam, tersedianya lapangan pekerjaan pada setiap daerah dan faktor perpindahan penduduk baik urbanisasi atau migrasi. Berbagai macam faktor yang dapat dapat mempengaruhi tingginya tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Banten, salah satunya adalah Tingkat Pendidikan. Setiawan (2015) menyatakan dalam penelitiannya bahwa peningkatan lapangan kerja menyebabkan pengangguran jika tidak tersedia cukup lowongan. Jumlah penduduk yang tinggi di Banten tidak berarti mereka sangat terampil sedangkan ukuran investasi SDM di sini adalah tingkat pendidikan yang akan berdampak pada TPT di daerah tersebut. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk merespon perubahan dan mempersiapkan negara untuk pembangunan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kualitas pendidikan (Cokorda et al., 2015). Untuk menggambarkan kualitas pendidikan di suatu wilayah digunakan rata-rata lama sekolah (RLS) yang diukur dari periode seseorang mengenyam pendidikan formal, yaitu seperti terlihat pada grafik dibawah ini:



**Gambar 1. 2 Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kab/Kota di Provinsi Banten Tahun 2013-2022 (Dalam Tahun)**

Sumber: Badan Pusat Statistik Banten (2023)

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Provinsi Banten pada Gambar 1.2 tersebut terus mengalami kenaikan tiap tahunnya. Sepanjang tahun 2013-2022

rata-rata secara keseluruhan dari rata-rata lama sekolah di Provinsi Banten mencapai 8 tahun atau setara dengan kelas dua SMP. Meskipun demikian, kenaikan RLS masih belum sepenuhnya mempengaruhi penurunan TPT di Kab/Kota Provinsi Banten. Rata-rata lama sekolah pada tahun 2018-2019 di Kab. Pandeglang kemudian pada tahun 2020-2021 di Kota Tangerang mengalami kenaikan namun tingkat Pengangguran terbuka juga ikut meningkat. Hal ini bertentangan dengan teori Modal Kapital (*Human Capital*) yang di kemukakan oleh Becker (1964), yang menyatakan bahwa peningkatan pendidikan yang ditempuh seseorang dapat meningkatkan pula penghasilan dan pekerjaan orang tersebut (Ramiayu, 2013).

Faktor kedua yang dapat mempengaruhi pengangguran adalah upah minimum. Menurut Alghofari (2010), upah mempunyai pengaruh terhadap jumlah angkatan kerja yang bekerja. Jika semakin tinggi tingkat upah yang ditetapkan, maka berpengaruh pada meningkatnya biaya produksi, akibatnya untuk melakukan efisiensi, perusahaan terpaksa melakukan pengurangan tenaga kerja, yang berakibat pada tingginya pengangguran (Kurniawan, 2013).



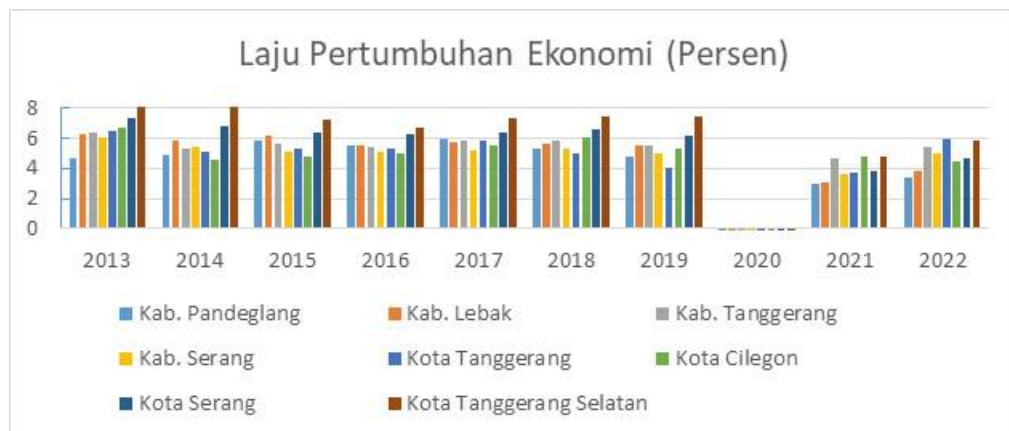
**Gambar 1. 3 Laju Upah Minimum Kab/Kota di Provinsi Banten Tahun 2013-2022 (Dalam Rupiah)**

Sumber: Badan Pusat Statistik Banten (2023)

Berdasarkan gambar 1.3 tersebut, upah minimum di Kab/Kota Provinsi Banten mengalami peningkatan setiap tahunnya meskipun peningkatan setiap tahunnya tidak terlalu banyak. Upah yang tinggi tersebut dikarenakan

permintaan dari para buruh. Kenaikan upah minimum bagi pekerja dapat memperbaiki daya beli mereka yang akhirnya akan mendorong keghairahan bekerja dan dapat meningkatkan produktivitas kerja. Tetapi kenaikan upah tersebut ternyata belum mampu menurunkan tingkat pengangguran. Hal tersebut terbukti dari tingkat pengangguran terbuka selama tahun 2013-2022 di kab/kota provinsi Banten masih tinggi sehingga dapat dikatakan belum mampu menurunkan pengangguran setiap tahunnya. Nilai upah minimum pada tahun 2013 ke 2014 di Kota Cilegon kemudian 2016 ke 2017 di Kab. Tangerang lalu pada tahun 2021 ke 2022 di Kota Serang mengalami kenaikan namun ditahun yang sama angka pengangguran juga naik sehingga hal ini tidak sesuai dengan teori.

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka adalah pertumbuhan ekonomi. Menurut hukum Okun (Okuns Law) bahwa peningkatan dalam pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan kesempatan kerja yang akan menyerap tenaga kerja sehingga pada akhirnya akan mengurangi tingkat pengangguran. Hal ini karena pertumbuhan ekonomi meningkat akan diikuti oleh peningkatan produktivitas masyarakat dalam menghasilkan barang dan jasa. Untuk menghasilkan barang dan jasa tentunya membutuhkan sumber daya seperti tenaga kerja, tenaga kerja inilah yang akan melakukan proses produksi sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran (Ahmad Sahlan Hadi & Riani, 2022). Tingginya TPT di Banten dapat ditekan salah satunya adalah dengan kontribusi dari indikator PDRB. Ada 3 sektor yang memiliki kontribusi tinggi di Banten dari berbagai sektor PDRB berdasarkan lapangan usaha selama tahun 2013-2022 diantaranya adalah sektor Industri pengolahan, sektor Perdagangan besar dan eceran; Resparasi mobil dan Perdagangan Besar dan Eceran, sektor Bukan Mobil dan Sepeda Motor (BPS, 2023). Oleh karena hal itu, masalah pengangguran dapat diatasi dengan banyaknya permintaan tenaga kerja jika semakin besar output yang dihasilkan dalam peningkatan faktor produksi.



**Gambar 1.4 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kab/Kota di Provinsi Banten Tahun 2013-2022 (Dalam Jutaan)**

Sumber: Badan Pusat Statistik Banten (2023)

Pada Gambar 1.4 dapat dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi di Kab/Kota provinsi Banten mengalami fluktuasi. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2014 ke 2015 di Kab. Lebak kemudian pada tahun 2016 menuju 2017 di Kab. Tangerang dan 2020 ke 2021 di Kota Tangerang, kota Serang dan kota Tangerang Selatan mengalami kenaikan namun ditahun yang sama angka pengangguran di kab/kota tersebut juga naik sehingga terjadi ketidak kesesuaian dengan teori.

Ada beberapa penelitian sebelumnya yang mencoba untuk mengupas dan membahas mengenai pengaruh dari RLS, Upah Minimum dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap TPT. Diantaranya Penelitian Susi Husila (2019), memperoleh hasil bahwa RLS berpengaruh negatif dan signifikan terhadap TPT. Sedangkan penelitian Suriati (2021), memperoleh hasil bahwa RLS berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap TPT. Penelitian Mahroji & Nurkhasanah (2019), memperoleh hasil bahwa upah minimum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap TPT. Sedangkan penelitian Ramiayu (2013), memperoleh hasil bahwa upah minimum berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap TPT. Penelitian Ramiayu (2013) juga memperoleh hasil bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap TPT. Sedangkan penelitian Ardian (2022) memperoleh hasil bahwa pertumbuhan

ekonomi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap TPT. Jika dilihat dari penelitian terdahulu yang meneliti pengaruh variabel rata-rata lama sekolah, upah minimum dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran terbuka di suatu daerah terdapat perbedaan hasil penelitian. Dimana hasil penelitian tersebut terdapat ketimpangan antara hasil penelitian satu dengan yang lainnya.

Berdasarkan latar belakang diatas, TPT di Banten masih menyentuh angka yang cukup tinggi jika dibanding dengan berbagai provinsi yang ada di pulau Jawa. Hal tersebut dapat disebabkan karena belum meratanya hasil usaha pemerintah dalam mengatasi masalah pengangguran di Banten, padahal dampak pengangguran bisa berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Jadi, pengangguran merupakan salah satu prioritas utama masyarakat dan dalam hal ini struktur ekonomi dan sosial setiap daerah harus melakukan segala upaya untuk menguranginya (Cristescu, 2017). Untuk itu diperlukan penelitian berkala mengenai faktor-faktor yang diyakini dapat mempengaruhi tingkat pengangguran di provinsi Banten, sehingga dapat digunakan sebagai upaya perbaikan kebijakan dalam mengatasi pengangguran.

## **1.2 Pertanyaan Penelitian**

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui jawaban dari pertanyaan berikut:

1. Apakah Rata-Rata Lama Sekolah berpengaruh terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Kab/Kota Provinsi Banten Tahun 2013-2022?
2. Apakah Upah Minimum berpengaruh terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Kab/Kota Provinsi Banten Tahun 2013-2022?
3. Apakah Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Kab/Kota Provinsi Banten Tahun 2013-2022?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang dan pertanyaan penelitian diatas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh RLS terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Kab/Kota Provinsi Banten Tahun 2013-2022.



2. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh Upah Minimum terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Kab/Kota Provinsi Banten Tahun 2013-2022.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Kab/Kota Provinsi Banten Tahun 2013-2022.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan hasil penelitian diharapkan berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan seperti:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan referensi serta wawasan pembaca mengenai pengaruh rata-rata lama sekolah, upah minimum dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran terbuka di kab/kota Provinsi Banten tahun 2013-2022.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian yang dilakukan penulis diharapkan memberikan hasil yang positif bagi pemerintah, masyarakat dan peneliti antara lain sebagai berikut:

- a) Bagi Pemerintah

Sebagai saran dan arahan bagi pemerintah atas dasar pertimbangan untuk pemaku kepentingan khususnya pemerintah Indonesia dalam membuat atau merancang kebijakan tentang pengangguran.

- b) Bagi Masyarakat

Sebagai informasi Pendidikan bagi masyarakat khususnya mengenai rata-rata lama sekolah, upah minimum dan pertumbuhan ekonomi serta tingkat pengangguran terbuka.

- c) Bagi Peneliti

Sebagai wawasan, pengalaman, dan edukasi tambahan dalam melakukan penelitian tentang rata-rata lama sekolah, upah minimum dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran terbuka di kab/kota Provinsi Banten tahun 2013-2022.